PT. BPR TANAH LAUT
- Jl. Pangeran Antasari No. 10 Pelaihari, - Tanah Laut
- 0512-22603
-

2021



LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA

OTORITAS JASA KEUANGAN

BPR BANK PERKREDITAN RAKYAT

BAB I
PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Tanah Laut mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Persereoan Terbatas.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali PIhak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Tanah Laut beserta perubahan-perubahannya.
s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakesholder..
Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR TANAH LAUT

1 **Transparancy (Keterbukaan)**

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2 **Accountability**

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders..
BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, dan strategi BPR.

3 **Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 **Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 **Fairness**

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Tanah Laut telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Tanah Laut menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Tanah Laut.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1	Nama	:	SUPRAPTO
	Jabatan	:	0101 - Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan. Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan pada pemegang saham. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan. Menetapkan strategi-strategi stategis untuk mencapakai visi dan misi perusahaan. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1	Nama	:	RINANTO
	Jabatan	:	0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, produksi, proyek dan kualitas hasil produksi. Membuat stategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara mencapai target tersebut. Membantu tugas-tugas direktur utama. Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam

		hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan standar operasional perusahaan. Bertanggung jawab pada pengembangan kualitas produk ataupun karyawan. Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama. Bertanggung jawab pada proses operasional Bpr.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris
Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris		
1	Nama	:	JOKO WURYANTO
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR antara lain melalui forum rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi atau melalui penyampaian surat secara tertulis. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Menengah/Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar BPR. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan BPR, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dinilai penting dalam rangka perkembangan BPR ke depan. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BPR disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPR. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan BPR.

			Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. Berkenaan dengan penerapan Good Corporate Governance pada BPR: Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan efektivitas praktik Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Memastikan bahwa keputusan Direksi telah sejalan dengan sasaran strategik jangka menengah/panjang perusahaan.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris		
1	Nama	:	FIFIANA FITRI AMALIA. SE.ME
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Memastikan bahwa keputusan Direksi telah sejalan dengan sasaran strategik jangka menengah/panjang perusahaan. Membantu ketua Dewan Komisarisdalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan; Melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Komisaris.
Rekomendasi Kepada Direksi			
Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	SUPRAPTO	-	-
2	RINANTO	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUPRAPTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RINANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUPRAPTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RINANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	JOKO WURYANTO	-	-
2	FIFIANA FITRI AMALIA. SE.ME	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	JOKO WURYANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FIFIANA FITRI AMALIA. SE.ME	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	JOKO WURYANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FIFIANA FITRI AMALIA. SE.ME	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	386.394.103	2	78.035.847
2	Tunjangan	2	0	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			386.394.103		78.035.847

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,84	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,23	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,72	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,60	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-1-11	4	Pembahasan Perkembangan dan RBB semester II tahun 2020 dan hal-hal lain yang dianggap perlu
2	2021-3-10	4	Pembahasan Penyesuaian RBB Tahun 2021, Rencana Pengembangan Kredit Konsumtif Guru Honorer atau PTT, Kredit setifikasi guru PNS di Kab. Tanah Laut, dan Perkembangan Kredit Gapura karomah tahun 2021
3	2021-4-15	4	Rapat Internal Pembahasan Rencana FGD program kredit gapura karomah dengan tim teknis, Rencana RUPS Laptah tahun 2021 dan pembahasan lainnya.
4	2021-8-24	4	Rapat Internal Pembahasan Surat Edaran Bupati tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi oleh Bendahara Gaji, Pembahasan Perkembngan Kredit Gaupara karomah posisi 31 Agustus 2021 dan Pembahasan terkait Laporan Pengawasan RBBPR Smester I 2021.
5	2021-9-15	4	Rapat Internal Pembahasan terkait SK Direksi tentang Bantuan Kedukaan dan Perayaan Pernikahan, Suku Bunga Tabungan dan Pedoman ATI. Smester I 2021.
6	2021-10-5	4	Rapat Internal Pembahasan terkait Rencana Pelaksanaan Pengelolaan dana Desa oleh BPR Tala, Perkembangan Kredit baik kredit komsutif, modal kerja, gapura karomah, penyelesaian NPL gapura karomah, penyempurnaan/ atau revisi beberapa SK Direksi terkait perkreditan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK.
7	2021-12-4	5	Rapat Internal Pembahasan terkait Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022, Rencana pelaksanaan tanggal RUPS, dan Study banding ke BPR Delta Artha terkait tindak lanjut rencana pengelolaan Dana Desa melalui BPR Tala.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	JOKO WURYANTO	4	4	114,00%
2	FIFIANA FITRI AMALIA. SE.ME	4	4	114,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	0	0	SUPRAPTO	DIREKTUR UTAMA	0	0	Sesuai ketentuan internal

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tanah Laut ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Tanah Laut. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tanah Laut ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Tanah Laut, Terima Kasih.

- Tanah Laut , 27 April 2022

Persetujuan Pengurus PT. BPR Tanah Laut

JOKO WURYANTO	**SUPRAPTO**
-	**-**